

LAPORAN TRIWULAN II TA 2023

**LINGKUP
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN**



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permentan Nomor 13 tahun 2023, tugas dan fungsi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) adalah melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta mengkoordinasikan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) di 33 Provinsi.

Visi BBPSIP yaitu menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk meningkatkan nilai tambah, dan daya saing dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Misi BBPSIP yaitu: (1). Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; (2). Fasilitasi penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh; (3). Melaksanakan birokrasi BBPSIP yang efektif, efisien dan akuntabel.

Agar pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dapat tercapai sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penyusunan laporan secara periodik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pimpinan untuk melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai antisipasi atau koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran dan tujuan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Bogor, Juli 2023
Kepala Balai Besar Penerapan,

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc
NIP. 196705141997031002

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Keluaran	4
II. AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. Capaian Kinerja	7
2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	8
III. KEGIATAN STRATEGIS	9
3.1. Perbenihan, UPBS	9
3.2. Diseminasi dan Penyebarluasan Standar Instrument Pertanian.....	11
3.3. ICARE.....	12
3.4. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi.....	19
3.5. Bimbingan Teknis.....	21
3.6. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.....	22
3.7. Pendampingan Sarana Pengujian Lembaga Sertifikasi	23
IV. KEGIATAN DUKUNGAN DAN MANAJEMEN.....	25
4.1. Laporan Aplikasi Monev <i>Online</i>	25
4.1.1. SMART DJA	25
4.1.2. E-MONEV BAPPENAS.....	27
4.1.3. E-MONEV BSIP	31
4.1.4. E-SAKIP	37
4.2. Kegiatan Manajemen.....	37
4.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM	37
4.2.2. Pengelolaan Ketatausahaan Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan BB Penerapan.....	40
4.2.3. Kegiatan Publikasi dan Humas.....	40
4.2.4. Kerjasama	42
V. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komoditas, Lokasi, Target, Anggaran dan Realisasi Perbanyak Benih Bulan Juni Tahun 2023.	9
Tabel 2. Lokasi kegiatan ICARE.....	13
Tabel 3. Kinerja Anggaran Satker BBPSIP	26
Tabel 4. Nilai kinerja Anggaran lingkup BBPSIP.....	26
Tabel 5. Anggaran per jenis belanja lingkup BBPSIP sd Juni TA 2023.....	31
Tabel 6. Realisasi SPM dan SP2D	33
Tabel 7. Realisasi fisik RO-KRO	35

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Berdasarkan Permentan Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP, tugas dan fungsi BBPSIP adalah penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, disamping tugasnya mengkoordinasikan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) di 33 Provinsi. Secara terinci, BBPSIP mempunyai fungsi, sebagai berikut: (a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian, (b) Pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian, (c) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi, (d) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional, (e) Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian, (f) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian, (g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian, dan (h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2023 BB Penerapan memiliki beberapa kegiatan strategis, yaitu:

- A. Kegiatan strategis mendukung program nilai tambah dan daya saing industri, meliputi kegiatan:
 1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan, mencakup:
 - a. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan
 - b. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi hortikultura
 - c. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi perkebunan
 - d. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan
 2. Lembaga Penerap Standar yang didampingi
 - a. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 - Pendampingan Penerapan standar instrumen pertanian
 - Pengujian penerapan standar instrumen pertanian
 3. *Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)*
 - Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)
 4. Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan
 - a. Diseminasi standar instrumen pertanian
 - Diseminasi
 - Penas
 - Taman Agrostandar
 - b. Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian
 5. Sarana Laboratorium Standardisasi
 - a. Laboratorium Terstandar

- B. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, meliputi:
 - 1. Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar
 - Benih Tanaman Pangan
 - 2. Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar
 - Produksi Benih/Bibit Sumber Ternak
 - 3. Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar
 - Benih Perkebunan
 - 4. Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar
 - Benih Hortikultura
- C. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - Standar Tata Kelola UPBS

Pelaksanaan program/kegiatan hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi. Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, BBPSIP telah melakukan Pengukuran kinerja dan melaporkannya secara rutin kepada BSIP dan seterusnya kepada Menteri Pertanian.

1.2. Tujuan

Laporan Bulanan merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBPSIP untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan sumber daya yang didasari suatu perencanaan strategis, dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.217/KPTS/PW./60/H/02/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu tujuan dari Laporan Kinerja adalah menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian diterapkan tingkat di Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Pertanian serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan laporan bulanan adalah sarana pemantauan capaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan untuk melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai antisipasi atau koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran dan target Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Renstra 2022-2024 (Draft), BBPSIP Tahun 2023 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen Pertanian
2. Meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi berikut:
 - a. Jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan
 - b. Jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, indikator tujuan ini yaitu :
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Terkelolanya Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yang akuntabel dan berkualitas
 - a. Nilai kinerja (berdasarkan PMK yang berlaku)

1.3. Sasaran

Sasaran Program BBPSIP tahun 2023 tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Indikator Kinerja:
 - a. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (Target: 34 SNI)
 - b. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Target: 34 Lembaga)
2. Meningkatnya produksi Instrumen Pertanian Terstandar Indikator Kinerja:
 - a. Jumlah produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Target: 167.607,5 Unit)
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Target Nilai: 81)

4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Bekualitas Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Target Nilai: 91,5)

Tersusunnya laporan kinerja yang disusun secara periodik diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif, sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai, serta membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis

1.4. Keluaran

Keluaran Lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Terdiseminaskannya 34 Standar Instrumen Pertanian (SNI)
2. Terdapat 34 Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian
3. Dihasilkannya 167.607,5 unit produk Instrumen Pertanian Terstandar; dengan rincian:
 - Produksi Benih Padi 190,5 Ton
 - Produksi Benih Jagung 38 Ton
 - Produksi Benih Jeruk 10.000 Batang
 - Produksi Benih Kopi 95.500 Pohon
 - Produksi Benih Kelapa 10.500 Pohon
 - Produksi Benih Kakao 7.000 Pohon
 - Produksi Bibit Ayam KUB 44.344 Ekor
 - Produksi Benih Domba 35 Ekor
4. Tercapainya Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 81
5. Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 91,5

BBPSIP tahun 2023 juga memiliki kegiatan teknis Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan target keluaran sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 - a. Data dan informasi kegiatan pengujian standar instrument pertanian di 33 BPSIP
 - b. Satu (1) panduan pelaksanaan kegiatan pengujian standar instrument pertanian lingkup BBPSIP
 - c. Satu (1) dokumen acuan pengujian standar instrument pertanian lingkup BBPSIP
2. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian
 - a. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan institusi/instansi terkait baik pusat maupun daerah.
 - b. Terdiseminasinya hasil standardisasi instrumen pertanian kepada stakeholder sekaligus menjaring umpan balik kebutuhan standar instrumen pertanian.

- c. Tersusunnya pedoman bagi pelaksana kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian di 33 BPSIP.
 - d. Meningkatnya kapasitas pejabat fungsional lingkup BSIP.
- 3. Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi peternakan
 - a. Dokumen mapping ketersediaan SNI komoditas peternakan
 - b. Data kebutuhan standar yang dibutuhkan stakeholder di spesifik lokasi pada komoditas peternakan
 - c. Dokumen kesesuaian penerapan SNI di spesifik lokasi
- 4. Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan
 - a. Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kebutuhan SNI standar instrument spesifik lokasi tanaman pangan
 - b. Dokumen mapping hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan potensial peningkatan nilai tambah dan daya saing lingkup BBPSIP
 - c. Dokumen kesesuaian penerapan SNI spesifik lokasi tanaman pangan
 - d. Tersusunnya dokumen hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan sebagai usulan PNPS ke Pusat/Balai Pengujian.
- 5. Pengelolaan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan tentang teknologi pertanian terstandar dari direktorat teknis 4 subsektor (TP, horti, bun, nak)
 - b. Mengidentifikasi substansi materi penyuluhan yang tersedia di BPSIP selindo tentang teknologi pertanian terstandar untuk komoditas unggulan dan spesifik lokasi
 - c. Melakukan analisis gap/kesenjangan materi penyuluhan (mengenai teknologi pertanian terstandar) antara kebutuhan direktorat teknis dan yang tersedia di BPSIP selindo
 - d. Tersedianya materi penyuluhan yang terstandar siap untuk didiseminasikan mendukung program strategis 4 subsector antara lain tanaman pangan, horti, perkebunan dan peternakan sesuai hasil analisis gap
- 6. Tata Kelola UPBS
 - a. Strategi dan mekanisme pengelolaan benih sumber terstandar mendukung program strategis Kementerian Pertanian
 - b. Pedoman (standar) tata kelola Unit Produksi Benih terStandar di lingkup BB Penerapan
 - c. Data dan informasi pengelolaan perbenihan/pembibitan terstandar termasuk laboratorium uji benih di lingkup BB Penerapan
- 7. Pendampingan Sarana Pengujian Lembaga Sertifikasi
 - a. Data dan Informasi jumlah laboratorium yang ada di UPT selindo lingkup BBPSIP
 - b. Data dan informasi sumber daya laboratorium lingkup BBPSIP dalam pengembangan dan penerapan standar instrumen pertanian

- c. Data dan informasi perencanaan program dan anggaran pengembangan kapasitas laboratorium lingkup BBSIP
8. Koordinasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- a. Data dan informasi (a) masalah pencapaian target program strategis peningkatan nilai tambah dan ekspor produk pertanian dan (b) standar pertanian yang berpotensi diterapkan selain SNI dan usulan BPSIP.
 - b. Data dan informasi sasaran dan mekanisme pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di 33 BPSIP.
 - c. Satu petunjuk pelaksanaan kegiatan pendampingan standar instrumen pertanian lingkup BBPSIP.
 - d. Data dan informasi hasil pengawalan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian.

II. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian TA. 2023, terdapat 4 IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) di BBPSIP yang mendukung pencapaian IKSP (Indikator Kinerja Sasaran Program) BSIP.

Berdasarkan Renaksi yang telah disusun di lingkup BSIP, BSIP memiliki sasaran program pertama (SP1) berupa Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP): Persentase penerapan standar instrumen pertanian, terdiri dari: a) Data SNI yang sudah diterapkan oleh pengguna, b) Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP.

Pada SP1 ini, sesuai PK BB Penerapan yang memiliki sasaran kegiatan: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Terstandardisasi yang akuntabel dan berkualitas.

Pada SP2, Indikator kinerja yang ditetapkan adalah: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), 2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrume pertanian (Lembaga), 3) Jumlah produksi instrumen pertanian standar yang dihasilkan (unit), 4) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai) dan 5) Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai).

Berdasarkan tabel Renaksi yang telah disusun, sampai dengan akhir Juni 2023, realisasi indikator pertama sebesar 52 SNI. Pada tahun anggaran 2023, kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi ditargetkan menghasilkan 52 dokumen sebagai bahan usulan PNPS. Hasil identifikasi di BPSIP terdapat 13 usulan revisi SNI dan 30 usulan baru SNI. Jenis SNI yang menjadi fokus identifikasi meliputi 24 SNI produk, 23 SNI proses, dan 4 SNI sistem.

Kegiatan identifikasi standar instrument pertanian lingkup BBPSIP tahun 2023 didominasi oleh sub sektor hortikultura sebanyak 12 komoditas, sub sektor perkebunan sebanyak 4 komoditas, sub sektor peternakan dan sub sektor tanaman pangan masing-masing 3 komoditas.

Untuk indikator kedua sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 ini, ditargetkan 34 Lembaga yang akan menerapkan SNI sesuai standar. Berdasarkan hasil identifikasi lingkup BBPSIP, akan diterapkan beberapa jenis Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi SNI produk sebanyak 28 standar, SNI sistem sebanyak 4 standar, SNI proses sebanyak 2 standar, dan SNI SDM sebanyak 2 standar. Lembaga Penerap meliputi kelompok tani, koperasi, Industri Kecil Menengah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, Kelompok Wanita Tani, PT, CV, asosiasi pelaku usaha serta pondok pesantren.

Output indikator ketiga yaitu jumlah produksi instrumen pertanian standar yang dihasilkan yaitu berupa benih yang telah tersertifikasi. Benih tersebut berupa benih

yang telah tersertifikasi yang merupakan benih dari alokasi anggaran pada Tahun 2022. Kegiatan sampai pada tahap:-Sertifikasi benih kegiatan Tahun 2022 : (25.301 ton tanaman pangan, tanaman hortikultura (26.023 kg, 12.862 batang, 5.502 planlet) dan 118.667 pohon tanaman perkebunan). Sedangkan untuk tahun 2023 kegiatan sampai pada tahap persiapan lahan.

BB Penerapan juga berkontribusi pada capaian IKSP3 BSIP, yang memiliki SP3 berupa Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai). Untuk mendukung capaian indikator dimaksud, beberapa kinerja yang telah dilaksanakan yaitu : pengumpulan data dukung dalam rangka penilaian maturitas SPI lingkup BSIP, penilaiaian IKM, penyusunan laporan keuangan.

Sasaran Kegiatan di BB Penerapan yang mendukung SP4 yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai) dengan capaian pada bulan Juni sebesar 54,60%.

2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BB Penerapan diantaranya:

- Adanya pemblokiran anggaran dan baru dapat digunakan di bulan Mei 2023.
- Adapun beberapa upaya pemecahan permasalahan diatas diantaranya:
- Pemacuan serapan anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan.
- Mempercepat kegiatan secara internal, serta kegiatan dilaksanakan mengikuti agenda BSIP.

III. KEGIATAN STRATEGIS

3.1. Perbenihan, UPBS

Kegiatan perbanyak benih/bibit Tahun Anggaran 2023 lingkup BBPSIP terdiri dari 8 komoditas yang terbagi kedalam : subsektor Tanaman Pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk), perkebunan (kakao, kopi dan kelapa), dan peternakan (Ayam KUB dan domba). Total anggaran sebesar Rp. 6,6 milyar dengan target produksi benih/bibit, masing-masing: 190.500 kg (padi), 38.000 kg (jagung), 10.000 batang (jeruk), 7.000 pohon (kakao), 95.500 pohon (kopi), 10.500 pohon (kelapa), 35 ekor (domba), dan 44.344 ekor (ayam KUB).

Realisasi fisik dikelompokkan menjadi dua, yaitu: realisasi teknis dan output. Realisasi teknis dimaksud adalah proses/tahapan kegiatan dari penyusunan proposal hingga menjadi benih (bersertifikat)/bibit dan pemanfaatannya (distribusi). Sedangkan realisasi output adalah capaian/produksi benih/bibit dibandingkan dengan target. Pembagian atau pengelompokkan ini dibuat untuk melihat sinkronisasi antara tahapan atau proses kegiatan dengan realisasi keuangan. Realisasi fisik proses hingga bulan Juni 2023 mencapai 25,6%, sedangkan realisasi output baru mencapai 0,3%. Realisasi keuangan sebanyak Rp. 942.065 juta atau 14,27% bertambah sebanyak 0,72% dibandingkan realisasi keuangan bulan Mei 2023 yang 13,55%. Secara terinci lokasi, alokasi anggaran dan target produksi serta realisasi fisik (teknis dan Output) masing-masing komoditas pada Tabel 1.

Tabel 1. Komoditas, Lokasi, Target, Anggaran dan Realisasi Perbanyak Benih Bulan Juni Tahun 2023.

No	Komoditas	Lokasi	Target		Realisasi (%)		Anggaran (Rp.000)		
			Volume	Satuan	Teknis	Out put	DIPA	Realisasi	%
1	Padi	27 BPSIP , Kecuali : Lampung, Bengkulu, Bali, Sulsel, Pabar & Sulbar	190.500	kg	32,0	0	3.040.000	568.351	18,70
2	Jagung	9 BPSIP : Sumsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Maluku, Papua, Malut, Sulbar & Kepri	38.000	kg	22,3	0	885.000	82.508	79,37
3	Jeruk	1 BPSIP : Riau	10.000	Batang	25,0	0	100.000	5.976	5,98
4	Kakao	1 BPSIP : Papua Barat	7.000	Pohon	17,0	0	100.000	-	-
5	Kopi	8 BPSIP : Aceh, Babel, Lampung, Bali, Sulsel, Sultra, Sulbar & Pabar	95.500	Pohon	20,3	0	840.000	10.460	1,2
6	Kelapa	2 BPSIP : Bali & Kalimantan Barat	10.500	Pohon	30,0	0	220.000	95.400	43,4
7	Domba	1 BPSIP : Yogyakarta	35	Ekor	25,0	0	40.000	-	-
8	Ayam KUB	11 BPSIP : Sumut, Sumbar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Kalsel, Sulfsel & Sulteng	44.344	Ekor	35,6	2,59	1.375.000	179.370	10,3
Jumlah			395.879		25,9	0,3	6.600.000	942.065	14,27

Realisasi fisik Tanaman Pangan komoditas padi rata-rata adalah 32,0% atau bertambah 3,37% dibandingkan bulan sebelumnya. tertinggi adalah NTT yang mencapai 75% selanjutnya Gorontalo dan Yogyakarta yang 60%, sementara terendah realisasi adalah Kepulauan Riau yaitu 15%. Umumnya kegiatan baru berjalan sampai tahap koordinasi eksternal, baik CPCL maupun koordinasi dengan para pihak atau stakeholder di daerah dan persiapan lahan. Sementara Gorontalo sudah pada tahap pemeliharaan tanaman, lebih jauh lagi NTT sudah memasuki masa panen. Gorontalo dan NTT melakukan kegiatan persiapan hingga ketahap tersebut dilakukan mengikuti musim tanam di daerah setempat yang berlangsung pada bulan Januari-Februari dan ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan dan

perkembangan tanaman. Meskipun anggaran yang dialokasi di DIPA masih terblokir atau belum dapat dimanfaatkan. Komoditas tanaman pangan lainnya yang diperbanyak adalah jagung. Realisasi fisik perbanyak benih jagung masih lebih rendah dari padi, yaitu pada kisaran 17-65% dengan rata-rata 24,8%. Realisasi tertinggi di Gorontalo yang mencapai 65 %, dimana tanaman sudah berumur 70 hari. Sementara daerah lainnya baru melakukan kordinasi internal, eksternal, penentuan dan pemilihan lokasi dan petani kooperator. Realisasi keuangan padi pada akhir Juni 2023 adalah Rp. 568 juta atau baru 18,7 % dari total anggaran. Sementara realisasi komoditas jagung sebesar Rp. 82,508 juta atau 8,8% dari total anggaran perbanyak benih padi dan jagung.

Jeruk menjadi satu-satunya komoditas dari sub sector hortikultura, realisasi fisik baru mencapai 25% dengan kegiatan masih pada tahap persiapan, yaitu proposal, seminar dan perbaikan proposal, koordinasi internal, Persiapan shading net untuk rumah persemaian dan pembuatan bedengan untuk persemaian batang bawah dan Pemeriksaan calon batang bawah oleh petugas pengawas benih tanaman. Realisasi keuangan baru mencapai 5,98% atau sebanyak Rp. 5,97 juta.

Kakao, kopi dan kelapa menjadi komoditas yang diperbanyak dari sub sector perkebunan. Kopi menjadi komoditas yang paling banyak dikembangkan, yaitu di 8 BPSIP, selanjutnya kelapa di 2 BPSIP dan Kakao di 1 BPSIP. Realisasi fisik kopi rata-rata baru 20,3% atau tahap persiapan dan tahap penyemaian bibit kopi 10.000 pohon (Sulawesi Tenggara). Sementara kelapa sudah mencapai 65% di Bali dengan perkembangan pada tahap kondisi pertanaman ada yang telah memasuki fase vegetatif dan fase generative, sedangkan di Kalimantan Barat masih pada tahap persiapan. Pengangkutan butiran benih kelapa ke lokasi tempat perbenihan, persiapan tempat persemaian butiran buah kelapa yaitu perbaikan paranet yang sudah lepas, kemudian pembuatan bedengan untuk tempat persemaian. Realisasi perbanyak benih kelapa di Kalimantan Barat tersebut sudah mencapai 35%. Pelaksanaan perbanyak benih Kakao di Papua Barat sejauh ini masih pada tahap persiapan dengan realisasi 17%. Realisasi keuangan, masing-masing: Kakao adalah Rp.0 dan 0%, Kopi adalah Rp. 10,460 juta atau 1,2% dan kelapa sebesar Rp. 95,4 atau 43,4%.

Perbanyak bibit sub sektor Peternakan terdiri dari komoditas domba dan ayam KUB. Perbanyak domba di Yogyakarta, pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan lahan penggembalaan, pakan silase dan rumput ternak kambing realisasi fisik 20 %. Perbanyak bibit ayam KUB realisasi fisik sudah mencapai 35,6%, yaitu persiapan kandang, sanitasi dan pemeliharaan DOC. Realisasi keuangan sampai akhir Juni 2023 perbanyak bibit domba, meskipun persiapan lahan dan rumput hijauan pakan ternak sudah dilaksanakan, namun realisasi keuangan masih Rp.0. Sementara Ayam KUB sudah menyerap anggaran sebesar Rp. 179,37 juta atau 13,0%. Rendahnya nilai serapan dimaksud disebabkan 5 dari 11 BPSIP yang mengembangkan perbibitan ayam KUB belum merealisasikan anggarannya.

Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan dalam Pelaksanaan perbanyak benih padi diluar musim berakibat pada: 1) sulitnya mendapatkan lahan yang ideal guna perbanyak benih, petani dan calon kooperator umumnya sudah selesai bercocok tanam dan tanaman padi saat ini

sudah pada fase vegetatif, 2) lahan yang tersedia relative terbatas karena memasuki musim kemarau, dan 3) kekurangan pasokan air akibat perbaikan sebagian saluran irigasi, 4) keterlambatan pencairan anggaran akibat adanya pemblokiran pada DIPA. Sementara kendala pada perbanyakan tanaman jagung, antara lain: 1) Menunggu ketersediaan Parent Seed (Benih Tetua) dari BPSIP Tanaman Serealia, 2) kekeringan, dan 3) terbatasnya lahan yang ideal untuk pertanaman karena kemarau. Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan, antara lain: 1) Memanfaatkan lahan sawah irigasi yang suplai airnya tersedia sepanjang tahun, 2) Menggunakan pompanisasi untuk menjamin ketersediaan air, melalui metoda irigasi berselang, *intermitten*. dan 3) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertanian) untuk mendapatkan informasi, arahan dan rekomendasi lokasi yang ideal untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya target kegiatan.

Permasalahan perbanyakan benih tanaman hortikultura dan perkebunan, antara lain: 1) Lokasi (KP) lokasi awal yang direncanakan terlalu jauh dari kantor, 2) benih belum tersedia, 3) kontrak belum selesai. Penyelesaian masalah melalui : 1) memindah lokasi dari KP yang direncanakan ke lokasi baru yang lebih dekat untuk memudahkan pengawasan di luar KP, 2) mempercepat proses pengadaan dan pengiriman benih dari Balai komoditas terkait, dan 3) mempersiapkan lahan dan prasarana lainnya untuk perbanyakan benih agar benih yang tiba dapat diperlakukan sesuai SOP, dan 4) segera menyelesaikan administrasi kontrak sehingga kegiatan dapat berjalan.

Masalah perbibitan domba maupun ayam KUB, yaitu: keterlambatan atau masih menunggu kedatangan bibit kambing dan DOC. Khusus DOC di Sumatera Barat, keterlambatan tersebut dikhawatirkan target produksi DOC 4.000 tidak akan tercapai untuk didesiminasikan. Sedangkan di Jawa Tengah penambahan jumlah DOC mengakibatkan alokasi anggaran untuk pakan tidak mencukupi. Serta belum tersedianya SOP dan keterlambatan pencairan GU yang juga terjadi pada semua komoditas. Pemecahan masalah yang diusulkan, yaitu: 1) mengomunikasikan agar pengiriman bibit domba agar dipercepat baik secara formal dan informal kepada pihak penyedia benih melalui saluran yang ada, 2) Mengganti pengadaan DOC dengan Pullet, 3) Pemeliharaan ayam sesuai SOP tatalaksana perbibitan ayam KUB sebelumnya dan menyiapkan Pedum, juklak dan juknis yang diperlukan sesuai dengan tupoksi BSIP, 4) revisi untuk menutupi kekurangan alokasi anggaran pakan, dan 5) mempercepat serapan anggaran di bulan berjalan.

3.2. Diseminasi dan Penyebarluasan Standar Instrument Pertanian

Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp. 11.694.350.000. Hingga saat ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.429.258 atau sekitar 20,77%.

Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarkan hasil standardisasi instrumen pertanian kepada *stakeholders*. Target jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang didiseminasikan sebanyak 34 SNI.

Hasil identifikasi awal di BPSIP menunjukkan bahwa SNI yang akan didiseminasikan berjumlah 135 SNI, meliputi 90 SNI produk, 29 SNI proses, dan 16 sistem (Namun belum diidentifikasi apakah ada *overlap* SNI yang didiseminasikan antar BPSIP). Jumlah penerima manfaat diseminasi sebanyak 13.425 orang. Dalam kegiatan ini,

sasaran diseminasi ditujukan kepada berbagai kelompok, antara lain kelompok tani, kelompok peternak, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, penyuluh, UMKM, nelayan, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), masyarakat umum, pemangku kebijakan, penangkar padi, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP).

Dengan diseminasi hasil standarisasi instrumen pertanian kepada berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai standar instrumen pertanian dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk pertanian, serta mendorong pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan KAK, RAB, dan proposal
2. Seminar proposal
3. Koordinasi internal tim
4. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait
5. Persiapan pameran
6. Persiapan display tanaman sayuran
7. Penyusunan materi penyuluhan
8. Persiapan bimtek

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya yaitu: 1) Waktu pelaksanaan bimtek sangat menyesuaikan dengan *stakeholders* di daerah; 2) Persemaian benih tidak tumbuh dikarenakan terlalu padat/banyak disemai; dan 3) Pemahaman mengenai penerapan standar instrumen pertanian dalam pengelolaan taman Agrostandar masih rendah dan terbatas.

Untuk itu, upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu: 1) Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait persiapan pelaksanaan bimtek; 2) Menghitung kembali jumlah kebutuhan persemaian/tanaman dan monitoring pertumbuhan pertanaman ditingkatkan; dan 3) Koordinasi mengenai penerapan standar instrumen pertanian dalam pengelolaan taman Agrostandar yang sudah ada di sekitar atau bahkan di daerah lain; Penataan *display* taman agrostandar; Identifikasi kebutuhan instrumen pertanian yang terstandar yang akan digunakan di taman agrostandar.

3.3. ICARE

Tujuan, Sasaran dan Keluaran Program ICARE:

- Tujuan: mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di lokasi terpilih
- Sasaran: Berkembangnya kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di lokasi terpilih mendukung ketahanan pangan dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional.
- Keluaran: Meningkatnya akses petani terhadap aset/sarana dan prasarana, serta layanan pertanian; terbangunnya kemitraan rantai nilai komoditas

pertanian; meningkatnya penjualan hasil/produk pertanian korporasi petani; dan meningkatnya produktivitas pertanian.

Tabel 2. Lokasi kegiatan ICARE

No.	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Komoditas
1	Ulu Belu, Air Nainingan dan Pulau Panggung	Tanggamus	Lampung	Kopi, ternak kambing
2	Cikajang, Cigedug, Cisurupan, Pasirwangi dan Sukaresmi	Garut	Jawa Barat	Kentang, ternak domba
3	Losari	Brebes	Jawa Tengah	Pisang, padi
4	Rembang, Sukorejo, dan Wonorejo	Pasuruan	Jawa Timur	Jagung, mangga
5	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	Jeruk, padi
6	Tombolo Pao dan Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan	Kentang, ternak sapi perah
7	Praya, Praya Barat, dan Praya Tengah	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Jagung, ternak ayam
8	Airmadidi, Kalawat, Talawaan, Dimembe, dan Kauditan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Kelapa, jagung
9	Aere dan Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kakao, sapi potong

Kemajuan pelaksanaan kegiatan ICARE

Jawa Barat

- a. Realisasi Keuangan
 - Rp 844.563.995 (49,68%)
- b. Realisasi Fisik
 - Verifikasi dan validasi data petani peserta Program ICARE
 - Data petani peserta Program ICARE yang tervalidasi baik petani participant maupun beneficiaries yaitu 1.663 petani kentang dan 2.445 peternak domba.
 - Petani peserta Program ICARE tersebar di lima kecamatan yaitu Pasirwangi, Cikajang, Cisurupan, Sukaresmi, dan Cigedug.
 - Analisis sampel tanah
 - Pengambilan sampel tanah telah dilakukan pada 100 titik sampel dengan rincian sebagai berikut: Kecamatan Pasirwangi 40 titik sampel, Cikajang 18 titik sampel, Cisurupan 15 titik sampel, Sukaresmi 16 titik sampel, dan Cigedug 11 titik sampel.

- Sampel tanah dalam tahap pengujian di laboratorium.
- Sosialisasi dan koordinasi Program ICARE tingkat kabupaten sekaligus pengesahan data CPCL
 - Tersosialisasikannya dan terinformasikannya Program ICARE kepada stakeholder terkait di tingkat kabupaten.
 - Pengesahan data CPCL Program ICARE oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut untuk komoditas kentang dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut untuk komoditas domba.
 - Rumusan rencana dukungan Pemerintah Kabupaten Garut terhadap Program ICARE.
- Koordinasi dengan Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut terkait penentuan center of excellence, site manager, dan inisiasi korporasi petani
 - Data calon center of excellence dari lima kecamatan pelaksana Program ICARE.
 - Data calon site manager Program ICARE.
 - Rencana tindak lanjut inisiasi korporasi petani.
- Pelaksanaan penilaian kinerja rantai nilai komoditas kentang dan domba secara partisipatif
 - Besaran nilai yang diperoleh setiap pelaku.
 - Tingkat risiko usaha yang dijalankan pelaku.
 - Perbedaan nilai yang diperoleh antar pelaku.
 - Pelaku yang menentukan harga.
 - Tindak lanjut atas penilaian rantai nilai.
- Koordinasi penggabungan kelompok tani ke dalam korporasi petani
 - BPSIP Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut menyepakati koperasi primer existing yaitu Koperasi Eptilu yang memiliki KBLI di bidang hortikultura dan peternakan.
 - Dinas Pertanian Kabupaten Garut akan mengkomunikasikan lebih lanjut terkait penggabungan kelompok tani ke dalam korporasi petani pada Program ICARE kepada pihak Pengurus Koperasi Eptilu.
 - Sumber daya manusia yang akan masuk dalam manajemen koperasi akan melibatkan champion dari lima lokasi kecamatan Program ICARE.
 - Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut akan mendukung Program ICARE terkait pembinaan koperasi dan UMKM.

Jawa Tengah

a. Realisasi Keuangan

- Rp. 386.364.836 (22,73%)

b. Realisasi Fisik

- Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ICARE oleh Direktur ICARE kepada PJ Bupati Brebes, SKPD Brebes yang terkait, pemerintah tingkat kecamatan dan desa serta petani CPCL di pendopo Bupati Brebes pada tanggal 20 Juni 2023.
- Telah dilaksanakan pengambilan data sampel tanah di lokasi ICARE yang dimulai pada tanggal 21 Juni 2023

- Koordinasi persiapan pelaksanaan TOT kultur jaringan dan aklimatisasi bibit pisang dilakukan ke IP2TP Subang.
- Mempelajari keragaan kondisi eksisting kelembagaan ekonomi petani untuk dijadikan materi TOT korporasi dilakukan tim BPSIP Jawa Tengah Bersama dengan narasumber dari UNS.
- Training of trainers (TOT) kultur jaringan dan aklimatisasi bibit pisang dilaksanakan selama 3 hari di IP2TP Subang dengan peserta 5 orang ASN BPSIP Jawa Tengah dan 1 orang ASN Dinas Pertanian dan KP Kab. Brebes.
- Koordinasi terkait materi pelatihan korporasi untuk ASN Kab. Brebes dilakukan ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Brebes.
- Training of Trainers (TOT) "Strategi pengembangan kelembagaan ekonomi petani padi dan pisang berbasis korporasi petani" dilaksanakan di Gedung serba guna (GSG) BPSIP Jawa tengah selama 2 hari yaitu tanggal 26-27 Juni 2023 dengan peserta ASN BPSIP Jateng sebanyak 12 orang (tim inti ICARE) dan ASN dari Dinas Pertanian dan KP Kab. Brebes sebanyak 5 orang

Jawa Timur

- a. Realisasi keuangan
 - Rp 68.566.200 (4,03%)
- b. Realisasi fisik
 - Finalisasi Hasil Validasi Data CPCL (Minggu 2-4 bulan Juni 2023)
 - Pembuatan Peta Polygon By Name By Address (Minggu 2-4 Juni 2023)
 - Workshop koordinasi program dan sosialisasi pada level regional (Minggu 3-4 Juni 2023)
 - Analisa Tanah (Minggu 3 Juni 2023)
 - FGD rantai nilai eksisting (Minggu 4 Juni 2024)
 - FGD untuk pembahasan peranan dan tanggung jawab stakeholder terkait di tingkat regional (Minggu 4 Juni 2025)
 - Inisiasi Pembentukan Korporasi Petani (Minggu 2-4 Juni 2026)
 - Training TOT (Minggu 3 Juni 2027)

Kalimantan Barat

- a. Realisasi keuangan
 - Total realisasi Rp 379.534.770 (22,33 %)
- b. Realisasi fisik
 - Koordinasi dan sosialisasi program di tingkat kabupaten
 - Penentuan hamparan/sub-hamparan calon lokasi CPL
 - Identifikasi poktan dan petani di setiap sub-hamparan calon lokasi yang sudah ditentukan.
 - Koordinasi dan sosialisasi program di tingkat kecamatan
 - Persiapan instrument penilaian rantai nilai
 - Pengambilan sampel tanah dan analisis tanah
 - Survey penilaian rantai nilai

Sulawesi Selatan

- a. Realisasi keuangan
 - Rp 1.020.419.180,- (60,02%)
- b. Realisasi fisik
 - Pengambilan sampel tanah dan analisis tanah sementara berjalan
 - Bimbingan Teknis Petani dan Pegawai Pemerintah
 - Melanjutkan Identifikasi dan validasi CPCL
 - Penilaian rantai nilai secara partisipatif
 - Penyusunan Rencana Agribisnis antar pemangku kepentingan publik dan swasta dalam pembangunan daerah

Sulawesi Utara

- a. Realisasi keuangan
 - 68.000.000,- (4%)
- b. Realisasi fisik
 - Survey verifikasi dan validasi data CPCL di 5 Kecamatan (Kauditan, Talawaan, Dimembe, Kalawat dan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara.
 - Kordinasi dan Sosialisasi Kegiatan ICARE di tingkat Kabupaten dan Kecamatan
 - Persiapan workshop Rantai nilai dan Pembuatan Peta Poligon
 - Survey calon lokasi demfarm

Lampung

- a. Realisasi keuangan
 - Rp. 165.463.129,- (9,73%)
- b. Realisasi Fisik
 - Identifikasi Potensi Wilayah
 - Karakteristik Rumah Tangga Petani
 - Serapan Tenaga Kerja
 - Pendapatan Rumah Tangga Petani
 - Usahatani kopi
 - Usaha ternak kambing
 - Validasi data CPCL Program ICARE Kabupaten Tanggamus dilakukan di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Ulubelu, Air Nanningan, dan Pulau Panggung. Verifikasi dilakukan dengan dua metode yakni peninjauan lahan kebun dan kandang ternak dan wawancara calon petani pelaksana. Peninjauan lahan kebun dan kandang ternak baru dilakukan di Kecamatan Ulubelu. Sedangkan di Kecamatan Air Nanningan dan Pulau Panggung verifikasi dilakukan dengan metode wawancara calon petani pelaksana program.

Nusa Tenggara Barat

- a. Realisasi keuangan
 - Rp. 188.422.200,- (11,08%)

- b. Realisasi fisik
 - Survei Validasi Data Calon Petani dan Calon Lahan/Lokasi (CPCL)

Sulawesi Tenggara

- a. Realisasi keuangan Rp 139.827.700,- (8,23%)
- b. Realisasi fisik
 - Koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kolaka Timur
 - Koordinasi dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kolaka Timur
 - Pengambilan sampel tanah
 - Validasi dan verifikasi lahan
 - Koordinasi dengan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai dinas yang menerapkan major project korporasi petani kakao
 - Koordinasi dengan manajer PT. Kakao Kolut Madani di Kolaka Utara
 - Survey lokasi kegiatan pelatihan/magang di PT. Kakao Kolut Madani
 - Survey penginapan peserta dalam kegiatan magang

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Jawa Barat

- Kendala
 - ✓ Identitas petani (NIK dan KK) peserta Program ICARE belum terkumpul seluruhnya
- Rencana tindak lanjut
 - ✓ pengumpulan NIK dan KK melalui Penyuluh Pertanian di kecamatan.

Jawa Tengah

- Kendala : belum ada
- Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Pelaksanaan pemetaan direncanakan pada minggu IV Juli 2023
 - ✓ Lanjutan pengambilan data sampel tanah akan terus dilakukan
 - ✓ Pelatihan tentang "Pengembangan kelembagaan ekonomi petani padi berbasis korporasi petani" untuk ASN lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes.
 - ✓ Persiapan yang meliputi penyiapan media tanam dan pembuatan sungkup.
 - ✓ Pelatihan aklimatisasi bibit pisang untuk ASN lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes.
 - ✓ Pelatihan korporasi petani untuk ASN lingkup BPSIP Jawa Tengah
 - ✓ Monitoring pertumbuhan bibit pisang asal kultur jaringan

Jawa Timur

- Kendala
 - ✓ waktu yang berbenturan dengan kegiatan lain di daerah
- Rencana Tindak Lanjut

Kalimantan Barat

- Kendala
 - ✓ Kebun jeruk tersebar pada sub-sub hamparan yang relatif tidak luas
 - ✓ Luas lahan masing-masing petani masih berdasarkan data di simluhtan dan perlu divalidasi
 - ✓ Sedang tahap penyusunan instrument
- Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Pengambilan sampel tanah dan analisis tanah (juni – Agustus)
 - ✓ Penyusunan peta geospasial (Menunggu jadwal dari PMU dan BBPSI SDLP)
 - ✓ Survey penilaian rantai nilai (Juni-Juli)
 - ✓ Workshop analisis rantai nilai eksisting dan penyusunan gap analysis (Juli)
 - ✓ Pembentukan korporasi petani (Juli)
 - ✓ Fasilitasi poktan mjd anggota korporasi petani (Juli-September)
 - ✓ Penyusunan rencana agribisnis tingkat Kawasan (Agustus)
 - ✓ Penyusunan rencana bisnis korporasi petani (Agustus)
 - ✓ Identifikasi kebutuhan peralatan, mesin, input produksi, dan infrastruktur dan merancang penyediaannya (September)
 - ✓ Penyusunan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan publik dan swasta dalam kawasan pengembangan (September)
 - ✓ Bimbingan teknis manajemen korporasi pertanian (Agustus-Oktober)
 - ✓ Pelatihan/magang keterampilan teknis dan usahatani (Agustus-Oktober)
 - ✓ Pelatihan/magang SDM Pemerintah (Agustus-Oktober)
 - ✓ Evaluasi peningkatan kapasitas SDM Pemerintah (November)
 - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait (Juni – Desember)

Sulawesi Selatan

- Kendala
 - ✓ Tidak ada kendala.
- Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Penyusunan Peta Poligon Lokasi Kegiatan ICARE (Menunggu jadwal dari PMU)
 - ✓ Dukungan pembentukan korporasi petani (Juli)

Sulawesi Utara

- Kendala
 - ✓ Terjadi keterlambatan pengambilan data karena jumlah petani CPCL cukup banyak di Kec. Talawaan yaitu 564 petani.
- Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Penyusunan Peta Poligon (Menunggu jadwal dari PMU)
 - ✓ Persiapan Pelaksanaan workshop koordinasi dan sosialisasi program ICare (Juli)

Lampung

- Kendala
 - ✓ Singkronisasi waktu dan perbedaan persepsi program Icare saat Koordinasi dengan Pemda Prov. dan Kab.
 - ✓ jarak jauh dan medan berat saat verifikasi CPCL
- Rencana Tindak Lanjut

Nusa Tenggara Barat

- Kendala
 - ✓ Data CPCL yang sudah diberikan oleh Kecamatan Terpilih (Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Tengah) masih perlu dilakukan verifikasi kembali untuk memastikan CPCL yang akan ditetapkan dengan SK Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah
- Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Menyelesaikan Verifikasi dan Validasi Data CPCL yang telah disetujui oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT HPT Keswan) lokasi Kecamatan terpilih dan selanjutnya pemetaan polygon (Juni 2023)

Sulawesi Tenggara

- Kendala
 - ✓ Jumlah total luas lahan CPCL yang diusulkan dari dinas belum memfasilitasi total luasan 1000 Ha
 - ✓ Ada indikasi beberapa petani beralih fungsi komoditas akibat masa tunggu kegiatan ICARE dari awal sosialisasi di Tahun 2021.
 - ✓ Belum adanya jadwal pendampingan dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
- Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Pertemuan lintas stakeholder yaitu aparat pemerintah kecamatan Aere dan Lambandi, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur.
 - Melaksanakan kegiatan penilaian rantai nilai eksisting terlebih dahulu

3.4. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tahun 2023, tersedia anggaran sebesar Rp. 3.805.000.000. Hingga saat ini, realisasi anggaran yang telah digunakan mencapai Rp. 422.875.000, yang setara dengan 11,11% dari total anggaran yang tersedia.

Pada tahun anggaran 2023, kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi ditargetkan menghasilkan 52 dokumen sebagai bahan usulan PNPS. Hasil identifikasi di BPSIP terdapat 13 usulan revisi SNI dan 30 usulan baru SNI. Jenis SNI yang menjadi fokus identifikasi meliputi 24 SNI produk, 23 SNI proses, dan 4 SNI sistem.

Kegiatan identifikasi standar instrument pertanian lingkup BBPSIP tahun 2023 didominasi oleh sub sektor hortikultura sebanyak 12 komoditas, sub sektor

perkebunan sebanyak 4 komoditas, sub sektor peternakan dan sub sektor tanaman pangan masing-masing 3 komoditas. Dengan rincian sebagai berikut:

Sub sektor peternakan:

1. Ayam di Sumbar, Jateng dan BBPSIP
2. Kambing di Lampung dan Bengkulu
3. Sapi di DIY

Sub sektor perkebunan:

1. Kakao di Sumbar
2. Pala di Sulut dan Pabar.
3. Pinang di Jambi
4. dan Malut belum menentukan komoditas.

Sub sektor tanaman pangan:

1. Jagung di Gorontalo
2. Padi di Sumbar, Bali, Kalteng, Sulut dan Papua
3. Talas Beneng di Banten

Sub sektor Hortikultura:

1. Bawang Merah di Sulteng
2. belum ada komoditas di Sumbar
3. Alpokat di Jakarta
4. Cabai Rawit di Kalsel
5. Jeruk di Kalbar
6. Kopi di Aceh, Sumsel, Jatim, dan Sulbar
7. Kopra di Riau
8. Mangga di Kepri
9. Manggis di Jabar
10. Sukun di Maluku
11. Salak di DIY
12. Pisang di Lampung

Secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan di BPSIP adalah sebagai berikut:

1. Membuat proposal kegiatan
2. Melaksanakan seminar proposal
3. Memperbaiki proposal yang telah diseminarkan
4. Koordinasi dengan stakeholder terkait
5. Melaksanakan rapat internal tim
6. Melaksanakan rapat dengan Kepala Balai, untuk menentukan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan
7. Penyusunan kuisioner

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tahun 2023 telah berjalan cukup baik. Meskipun anggaran yang telah direalisasikan baru mencapai 11,11% dari total anggaran yang tersedia, namun demikian, langkah-langkah selanjutnya dapat diambil untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1) Koordinasi pada stakeholder terkait belum dilakukan seluruhnya; 2) Belum tersedianya panduan umum terkait pelaksanaan kegiatan; 3) Belum dilakukan penggalian informasi mendalam terkait kesesuaian kebutuhan standar dengan instansi terkait, kelompok tani, maupun pelaku usaha terkait; 4) sumberdaya manusia yang belum tersertifikasi terutama dalam hal sortasi dan grading buah layak ekspor (Jabar); 5) Kegiatan masih dalam proses CPCL; 6) kurang jelas tujuan dan arah kegiatan; dan 7) Diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai proses identifikasi standar dan penyusunan usulan standar dan Petani belum memahami teknologi budidaya tanaman padi sesuai standar (SNI)

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu: 1) Melakukan sosialisasi dan wawancara mendalam terhadap stakeholder terkait pengusulan proses standar, Pelatihan pemahaman proses SNI di tingkat internal, FGD; 2) Melakukan koordinasi dengan BBPSIP; 3) terkait pengusulan proses standar, Pelatihan pemahaman proses SNI di tingkat internal, FGD; 4) Melakukan survei lokasi dan survei standar yang telah diterapkan oleh pelaku usaha; 5) Melaksanakan pertemuan atau FGD dengan stakeholder terkait; 6) Penentuan CPCL/Identifikasi; 7) Brainstorming dan diskusi lebih mendalam dengan pihak-pihak terkait; dan 8) Survei lapangan di tingkat petani dan UMKM mengenai penerapan standar serta FGD dengan pihak terkait mengenai kebutuhan standar padi spesifik lokasi dan Memberikan sosialisasi mengenai teknologi budidaya padi terstandar (SNI) kepada Penyuluh dan petani.

3.5. Bimbingan Teknis

Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian bertujuan untuk menyediakan materi penyuluhan pertanian guna menginformasikan, meningkatkan pengetahuan, menggugah minat dan meningkatkan keterampilan pengguna terhadap standar instrumen pertanian, yang pada gilirannya dapat diterapkan pada kegiatan usahatani atau pengembangan komoditas pertanian. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan diseminasi adalah pengguna materi penyuluhan standar instrumen pertanian, terdiri atas: (1) pengguna langsung, yaitu pelaku utama (petani/kelompok tani), pelaku usaha (UMKM, IKM) dan lembaga penerap standar instrumen pertanian lainnya, (2) pengguna antara, yaitu penyuluh pertanian dan stakeholder terkait yang melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, (3) masyarakat umum, petani, praktisi pertanian, pelajar, dan mahasiswa. Pelaksanaan tugas BBPSIP dan BPSIP dalam penerapan standar instrumen pertanian erat kaitannya dengan pelaksanaan diseminasi yang tepat sasaran. Proses pelaksanaan diseminasi yang diawali proses perencanaan berbasis pada kebutuhan pengguna, proses diseminasi yang melibatkan pengguna/sasaran secara aktif dengan menggunakan berbagai media dan metode diseminasi.

Peran pelaksana diseminasi dan sarana prasana penunjang yang ada di lingkup BBPSIP menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas diseminasi guna mendorong penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna.

Salah satu sarana untuk diseminasi melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis. Dalam pelaksanaan di BPSIP, Bimtek dilaksanakan dengan melibatkan aspirasi dan tanpa melibatkan aspirasi.

a) Kegiatan Bimtek ASPIRASI

Kegiatan Bimtek dengan melibatkan DAPIL, dilaksanakan di 19 BPSIP yaitu BPSIP NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Maluku, Papua, Maluku dan Sulbar. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 25 Milyar dengan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 319,605 juta (1,28%). Target SDM yang memperoleh Bimtek sebanyak 10.754 orang dengan realisasi sebanyak 200 orang (1,86%) sampai dengan triwulan 2. Proses pelaksanaan sampai dengan triwulan 2 sebagian besar belum ada koordinasi dengan Tenaga Ahli, masih menunggu arahan dari BB Penerapan. Selanjutnya menunggu rekonfirmasi dengan tim pusat terkait pelaksanaan Bimtek

b) Kegiatan Bimtek Non ASPIRASI

BPSIP yang melaksanakan Bimtek Non DAPIL sebanyak 14 BPSIP adalah BPSIP Riau, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Anggaran Bimtek Non ASPIRASI sebesar Rp 1,3 Milyar, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 236,04 juta (18,16%). SDM yang dilibatkan ditargetkan sebanyak 1.005 orang dan terealisasi sebanyak 508 orang sampai dengan Triwulan II (50,55%). Bimbingan teknis terbagi dalam 4 sub sektor yaitu tanaman pangan (10 BPSIP), hortikultura (1 BPSIP), perkebunan (3 BPSIP) dan peternakan (3 BPSIP) dengan cakupan komoditas padi, kopi, kakao, ayam KUB.

Perkembangan kegiatan secara umum :

- Koordinasi pelaksanaan ke Dinas Pertanian Kabupaten, persiapan pembibitan dan pembuatan persemaian pada demplot bimtek
- Pertemuan internal dan penyusunan juklak dan draf kuesioner
- Beberapa BPSIP telah melaksanakan bimbingan teknis perbenihan

Permasalahan :

Beberapa BPSIP belum melaksanakan survei calon lokasi dan calon peserta Bimtek

Tindak lanjut :

Melanjutkan identifikasi kebutuhan materi Bimtek pada kelompok tani

3.6. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Pada tahun 2023, total anggaran kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian lingkup BBPSIP sebesar Rp. 5.005.650.000. Hingga saat ini, realisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 585.850.000 atau sekitar 11,70%.

Tahun 2023 ini, ditargetkan 34 Lembaga yang akan menerapkan SNI sesuai standar. Berdasarkan hasil identifikasi lingkup BBPSIP, akan diterapkan beberapa jenis Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi SNI produk sebanyak 28 standar, SNI sistem sebanyak 4 standar, SNI proses sebanyak 2 standar, dan SNI SDM sebanyak 2 standar. Lembaga Penerap meliputi kelompok tani, koperasi, Industri Kecil Menengah, Masyarakat

Perlindungan Indikasi Geografis, Kelompok Wanita Tani, PT, CV, asosiasi pelaku usaha serta pondok pesantren.

Berbagai komoditas pertanian akan menjadi fokus dalam penerapan standar ini. Komoditas yang termasuk di antaranya adalah sapi, cabai, ayam KUB, aren, jagung, kakao, kelapa, nanas, pisang, krisan, mangga, manggis, alpokat, padi, pala, pinang, pupuk organik, ubi kayu, dan vanili.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: 1) Belum tersedia LSPro dengan ruang lingkup manggis; 2) Panduan Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengujian SNI yang akan diterapkan dan Belum tersedianya SDM profesional yang tersertifikasi LSPro; 3) SDM belum memahami mengenai SNI

Upaya Pemecahan Masalah, yaitu: 1) Identifikasi kondisi lembaga penerap; 2) Sosialisasi kegiatan; 3) Koordinasi dengan BB Penerapan.

3.7. Pendampingan Sarana Pengujian Lembaga Sertifikasi

Pada tahun 2023, total anggaran kegiatan pendampingan sarana pengujian lembaga sertifikasi adalah sebesar Rp. 10.454.611.000. Hingga saat ini (30 Juni 2023), realisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 169.000.000 atau sekitar 1,62%.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sarana pengujian di Lembaga Sertifikasi dengan target 31 unit. Kegiatan pendampingan sarana pengujian dilaksanakan di 31 BPSIP, kecuali BPSIP Babel dan BPSIP Bali yang tidak termasuk dalam kegiatan ini.

Dari 31 BPSIP tersebut, 10 sarana pengujian sudah terakreditasi. BPSIP yang sarana pengujiannya telah terakreditasi adalah BPSIP Sumut, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulsel, dan Papua Barat. Sedangkan BPSIP Sulsel dan Jatim sedang dalam proses perpanjangan akreditasi. Sementara itu, terdapat 21 BPSIP yang belum terakreditasi yaitu:

1. BPSIP NAD
2. BPSIP Sumatera Barat
3. BPSIP Riau
4. BPSIP Jambi
5. BPSIP Sumatera Selatan
6. BPSIP DKI Jakarta
7. BPSIP Yogyakarta
8. BPSIP NTT
9. BPSIP Kalimantan Barat
10. BPSIP Kalimantan Tengah
11. BPSIP Kalimantan Selatan
12. BPSIP Kalimantan Timur
13. BPSIP Sulawesi Utara
14. BPSIP Gorontalo

15. BPSIP Sulawesi Tengah
16. BPSIP Sulawesi Tenggara
17. BPSIP Maluku
18. BPSIP Papua
19. BPSIP Maluku Utara
20. BPSIP Sulawesi Barat
21. BPSIP Kepulauan Riau

Jumlah jenis layanan yaitu 113 jenis layanan, yang meliputi: Pengujian tanah, tanaman, pupuk, dan air, Pengujian mutu beras, Pengujian mutu benih (Kadar air, kemurnian fisik, daya tumbuh, pascapanen), pascapanen, Pupuk Organik, Pupuk NPK Padat, Tanah, Pakan Ternak dan Bahan Pakan, analisis jaringan tanaman.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan sarana pengujian di Lembaga Sertifikasi dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan hasil pengujian yang akurat dan dapat diandalkan dalam menjamin mutu dan keamanan produk pertanian.

Progres kegiatan sampai dengan bulan Juni yaitu:

1. Penyusunan KAK, RAB, pembuatan proposal, seminar proposal, dan persiapan pengadaan telah selesai dilaksanakan
2. Rapat koordinasi dengan tim pengadaan; melakukan komunikasi dengan penyedia; melakukan identifikasi kandungan TKDN/PDN/Impor produk yang akan dibeli; melakukan pemilihan peralatan yang ditawarkan vendor
3. pemilihan vendor untuk pengadaan peralatan laboratorium di e catalog
4. Pengecekan daftar harga pada aplikasi e-catalog LKPP
5. tahapan lanjutan dari proses peninjauan oleh pejabat PPK
6. Sudah melakukan DP untuk peralatan yang akan dipesan (BPSIP Jambi)

Permasalahan, antara lain:

1. SiRUP belum diupdate
2. bahan import, sehingga harus inden
3. Penawaran harga dari vendor yang belum sesuai kesepakatan/belum deal
4. Perbedaan harga antara RAB dengan harga pasar
5. adanya perubahan kebutuhan saran pengujian, pemilihan vendor yang dapat menyediakan peralatan sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang ditetapkan
6. Dominan alat impor sementara harus ada TKDN
7. Tidak semua barang tersedia pada aplikasi e-catalog LKPP
8. Adanya revisi POK atas harga peralatan

Upaya pemecahan masalah:

1. menunggu update dari SiRUP
2. pengadaan dilakukan sesuai prosedur
3. Komunikasi lebih intens dengan penyedia, melakukan proses penyiapan nota dinas untuk produk import yang akan di beli
4. Revisi POK
5. melakukan proses pengadaan untuk peralatan yang tidak mengalami perubahan serta mengajukan revisi peralatan yang sesuai kebutuhan
6. Membuat surat revisi ijin pembelian barang impor ke BBPSIP
7. Belanja pada aplikasi *Marketplace*
8. Percepatan realisasi setelah POK terbit

IV. KEGIATAN DUKUNGAN DAN MANAJEMEN

4.1. Laporan Aplikasi Monev *Online*

4.1.1. SMART DJA

Aplikasi SMART DJA adalah aplikasi monitoring dan evaluasi yang berbasis web dan dikembangkan oleh DJA, Kemenkeu. Aplikasi ini sebagai alat untuk mengukur IKU NKA. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.13 Tahun 2023 memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.

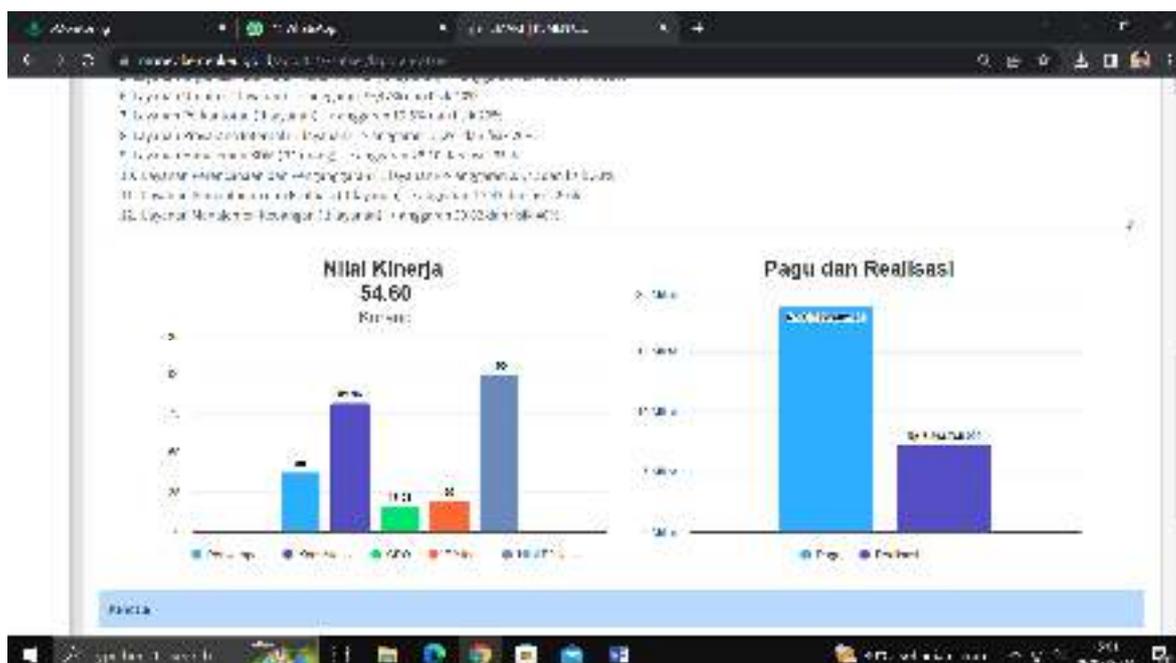
Rincian output utama BBPSIP Tahun 2023:

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan (target 2 standar)
2. Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (1000 orang)
3. Lembaga Penerap Standar yang didampingi (1 lembaga)
4. Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan)
5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (1 layanan)
6. Layanan Umum (1 layanan)
7. Layanan Perkantoran (1 layanan)
8. Layanan Prasarana Internal (1 layanan)
9. Layanan Manajemen SDM (71 orang)
10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 layanan)
11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 layanan)
12. Layanan Manajemen Keuangan (1 layanan)

Pencapaian Kinerja BBPSIP

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan (target 2 standar) --> anggaran 13,27% dan fisik 15%
2. Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (1000 orang) --> anggaran 37,38% dan fisik 40%
3. Lembaga Penerap Standar yang didampingi (1 lembaga) --> anggaran 7,26% dan fisik 10%
4. Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan) --> anggaran 96,02% dan fisik 95%
5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (1 layanan) --> anggaran 22,96% dan fisik 25%
6. Layanan Umum (1 layanan) --> anggaran 48,69% dan fisik 50%
7. Layanan Perkantoran (1 layanan) --> anggaran 22,89% dan fisik 25%
8. Layanan Prasarana Internal (1 layanan) --> anggaran 15,2% dan fisik 20%
9. Layanan Manajemen SDM (71 orang) --> anggaran 28,10 dan fisik 35%
10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 layanan)--> anggaran 30,92 dan fisik 35%
11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 layanan)--> anggaran 18,66 dan fisik 20%
12. Layanan Manajemen Keuangan (1 layanan)--> anggaran 46,20 dan fisik 50%

Tabel 3. Kinerja Anggaran Satker BBPSIP



Tabel 4. Nilai kinerja Anggaran lingkup BBPSIP

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CR O	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	567392	BPSIP Aceh	33,19	42,71	84,94	7,54	-5,58	36,04
2	450871	BPSIP Papua Barat	32,38	21,66	82,88	5,65	-2,19	44,52
3	633982	BPSIP Bali	29,26	46,08	96,11	9,95	-15,85	10,37
4	567737	BPSIP Maluku	28,72	34,4	88,76	5,91	-10,69	23,28
5	634040	BPSIP Nusa Tenggara Barat	26,11	34,82	88,33	4,04	-13,14	17,14
6	567517	BPSIP Lampung	25,75	31,93	72,16	1,76	-7,76	30,6
7	567318	BPSIP Jawa Tengah	25,16	31,42	91,58	1,33	-13,19	17,02
8	450840	BPSIP Kepulauan Babel	25,03	36,65	93,06	1,47	-14,54	13,64
9	500957	BPSIP Sulawesi Barat	24,87	48,17	88,65	9,34	-20	0
10	567830	BPSIP Papua	24,53	31,53	97	1,39	-15,51	11,23
11	567495	BPSIP Sumatera Selatan	24,48	28,61	87,4	1,61	-12,87	17,83
12	567460	BPSIP Riau	24,36	43,31	95,79	2,5	-17,7	5,74
13	633975	BPSIP DI Yogyakarta	24,33	42,3	84,21	3,84	-15,49	11,28
14	567428	BPSIP Sumatera Utara	24,03	38,04	91,67	1,39	-15,73	10,67
15	567673	BPSIP Sulawesi Tengah	23,88	31,43	88,29	1,36	-14,17	14,59
16	567364	BPSIP Jawa Timur	23,67	30,63	78,42	1,33	-11,82	20,44
17	567783	BPSIP Nusa Tenggara Timur	23,32	40,51	91,13	1,78	-17,16	7,1
18	450862	BPSIP Maluku Utara	23,25	38,22	90,1	1,43	-16,47	8,83
19	634001	BPSIP Jambi	23,18	49,1	97,76	1,43	-20	0
20	450856	BPSIP Gorontalo	22,38	45,19	96,51	1	-20	0
21	567449	BPSIP Sumatera Barat	22,04	41,58	89,86	1,39	-18,53	3,67
22	633996	BPSIP Bengkulu	22,03	38,52	83,52	1,43	-16,54	8,65

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CR O	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	567392	BPSIP Aceh	33,19	42,71	84,94	7,54	-5,58	36,04
23	634015	BPSIP Kalimantan Selatan	21,78	37,65	85,78	1,43	-17,36	6,61
24	648673	BBPSIP	21,37	34,4	80,84	1,43	-16,23	9,43
25	567296	BPSIP Jawa Barat	21,04	33,21	76,88	1,39	-15,5	11,25
26	567627	BPSIP Kalimantan Timur	20,6	38,61	81,21	1,43	-17,96	5,09
27	567702	BPSIP Sulawesi Tenggara	20,42	36,86	72,09	1,39	-15,63	10,92
28	567563	BPSIP Kalimantan Barat	19,87	32,77	68,37	1,36	-14,89	12,79
29	633961	BPSIP DKI Jakarta	19,51	41,43	69,88	1,43	-16,99	7,52
30	450831	BPSIP Banten	19,18	35,18	84,25	1	-20	0
31	567570	BPSIP Kalimantan Tengah	18,54	34,49	67,67	1,58	-16,94	7,66
32	634022	BPSIP Sulawesi Utara	18,21	30,27	81,53	1	-20	0
33	634036	BPSIP Sulawesi Selatan	18,04	38,1	76,01	1,17	-20	0
34	320091	BPSIP Kepulauan Riau	16,52	38,11	59,78	1,43	-18,16	4,61
		lingkup BBPSIP	23,27	37,00	84,19	2,50	-15,43	11,43

Kendala BBPSIP

Penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah, kelengkapan surat pertanggungjawaban yang belum lengkap sehingga menghambat proses pencairan anggaran, penggunaan.

Rekomendasi BBPSIP

Rekomendasi yang disarankan adalah mendorong penanggungjawab kegiatan untuk segera mempercepat penyerapan anggaran, mendorong pembantu pengelola anggaran untuk segera melengkapi surat pertanggungjawaban, melakukan koordinasi internal dan koordinasi eksternal dengan KPPN.

4.1.2. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga) yang juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga).

Microsoft Word - 01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Uraian Perencanaan	Perencanaan						Pelaksanaan			Total	Catatan		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jan	Feb	Mar				
01	Perencanaan dan Pelaksanaan													

01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Microsoft Word - 01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Uraian Perencanaan	Perencanaan						Pelaksanaan			Total	Catatan		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jan	Feb	Mar				
01	Perencanaan dan Pelaksanaan													

01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Microsoft Word - 01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Uraian Perencanaan	Perencanaan						Pelaksanaan			Total	Catatan		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jan	Feb	Mar				
01	Perencanaan dan Pelaksanaan													

01112021 - Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

4.1.3. E-MONEV BSIP

Aplikasi e-Monev BSIP untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup BSIP.

Tabel 5. Anggaran per jenis belanja lingkup BBPSIP sd Juni TA 2023

NO	KODE	SATUAN KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	TOTAL
				Ops	Non Ops	TOTAL		
1	648673	BBPSI	8.736.256.000	5.136.450.000	4.576.622.000	9.713.072.000	536.174.000	18.985.502.000
2	567392	BPSIP Aceh	5.377.436.000	1.670.000.000	2.329.381.000	3.999.381.000	75.000.000	9.451.817.000
3	567428	BPSIP Sumatera Utara	4.946.215.000	2.509.800.000	2.607.972.000	5.117.772.000	110.000.000	10.173.987.000
4	567449	BPSIP Sumatera Barat	5.919.161.000	3.779.000.000	2.915.363.000	6.694.363.000	200.000.000	12.813.524.000
5	567460	BPSIP Riau	4.392.556.000	1.765.000.000	1.567.947.000	3.332.947.000	100.000.000	7.825.503.000
6	634001	BPSIP Jambi	4.141.215.000	2.788.000.000	1.670.538.000	4.458.538.000	100.000.000	8.699.753.000
7	567495	BPSIP Sumatera Selatan	3.651.066.000	1.969.000.000	2.685.712.000	4.654.712.000	3.099.672.000	11.405.450.000
8	633996	BPSIP Bengkulu	4.583.933.000	2.092.500.000	1.637.746.000	3.730.246.000	775.000.000	9.089.179.000
9	567517	BPSIP Lampung	4.097.846.000	3.093.000.000	5.446.880.000	8.539.880.000	804.611.000	13.442.337.000
10	450840	BPSIP Kepulauan Bangka Belitung	2.188.839.000	2.144.500.000	1.600.136.000	3.744.636.000	0	5.933.475.000
11	320091	BPSIP Kepulauan Riau	1.395.036.000	1.127.000.000	1.489.639.000	2.616.639.000	50.000.000	4.061.675.000
12	633961	BPSIP DKI Jakarta	2.519.514.000	1.476.600.000	1.335.609.000	2.812.209.000	100.000.000	5.431.723.000
13	567296	BPSIP Jawa Barat	6.032.147.000	2.380.000.000	7.454.540.000	9.834.540.000	915.000.000	16.781.687.000
14	450831	BPSIP Banten	3.281.962.000	2.075.000.000	2.046.741.000	4.121.741.000	815.000.000	8.218.703.000
15	567318	BPSIP Jawa Tengah	8.566.710.000	3.891.000.000	5.950.415.000	9.841.415.000	450.000.000	18.858.125.000
16	633975	BPSIP DI Yogyakarta	6.082.231.000	2.372.000.000	1.937.863.000	4.309.863.000	125.000.000	10.517.094.000
17	567364	BPSIP Jawa Timur	6.538.416.000	3.263.500.000	7.758.263.000	11.021.763.000	800.000.000	18.360.179.000
18	633982	BPSIP Bali	5.930.799.000	1.550.000.000	1.938.719.000	3.488.719.000	0	9.419.518.000
19	634040	BPSIP NTB	6.327.156.000	2.167.000.000	4.291.070.000	6.458.070.000	840.000.000	13.625.226.000
20	567783	BPSIP NTT	7.841.489.000	2.603.000.000	2.926.501.000	5.529.501.000	100.000.000	13.470.990.000
21	567627	BPSIP Kalimantan Timur	5.156.055.000	1.699.500.000	2.738.824.000	4.438.324.000	795.000.000	10.389.379.000
22	567570	BPSIP Kalimantan Tengah	2.747.951.000	2.838.500.000	2.055.153.000	4.893.653.000	615.000.000	8.256.604.000
23	567563	BPSIP Kalimantan Barat	4.557.179.000	2.136.000.000	4.438.883.000	6.574.883.000	200.000.000	11.332.062.000
24	634015	BPSIP Kalimantan Selatan	5.022.631.000	2.343.000.000	1.730.064.000	4.073.064.000	715.000.000	9.810.695.000
25	634022	BPSIP Sulawesi Utara	4.895.641.000	1.637.500.000	3.372.098.000	5.009.598.000	100.000.000	10.005.239.000
26	567673	BPSIP Sulawesi Tengah	3.912.449.000	2.407.900.000	1.761.382.000	4.169.282.000	2.478.826.000	10.560.557.000
27	634036	BPSIP Sulawesi Selatan	8.547.895.000	5.805.150.000	6.089.217.000	11.894.367.000	885.000.000	21.327.262.000
28	567702	BPSIP Sulawesi Tenggara	4.528.623.000	3.176.000.000	3.342.795.000	6.518.795.000	50.000.000	11.097.418.000
29	500957	BPSIP Sulawesi Barat	1.943.573.000	1.564.000.000	1.890.672.000	3.454.672.000	60.000.000	5.458.245.000

NO	KODE	SATUAN KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	TOTAL
				Ops	Non Ops	TOTAL		
30	450856	BPSIP Gorontalo	2.945.000.000	1.546.000.000	1.657.795.000	3.203.795.000	80.000.000	6.228.795.000
31	567737	BPSIP Maluku	3.043.494.000	1.745.000.000	2.305.676.000	4.050.676.000	100.000.000	7.194.170.000
32	450862	BPSIP Maluku Utara	2.188.409.000	1.484.000.000	1.915.178.000	3.399.178.000	30.000.000	5.617.587.000
33	450871	BPSIP Papua Barat	1.742.239.000	1.771.000.000	1.579.733.000	3.350.733.000	4.532.073.000	9.625.045.000
34	567830	BPSIP Papua	4.051.199.000	1.800.000.000	1.903.965.000	3.703.965.000	2.855.904.000	10.611.068.000
TOTAL			157.832.321.000	81.805.900.000	100.949.092.000	182.754.992.000	23.492.260.000	364.079.573.000

Tabel 6. Realisasi SPM dan SP2D

NO	KODE	SATUAN KERJA	Pegawai			Barang			Modal			Total		
			PAGU	Realisasi (%)		PAGU	Realisasi (%)		PAGU	Realisasi (%)		PAGU	Realisasi (%)	
				SPM	SP2D		SPM	SP2D		SPM	SP2D		SPM	SP2D
1	648673	BBPSIP	8.736.256.000	35,6%	35,6%	9.713.072.000	42,1%	41,6%	536.174.000	15,2%	15,2%	18.985.502.000	38,3%	38,1%
2	567392	BPSIP Aceh	5.377.436.000	57,3%	57,2%	3.999.381.000	35,8%	35,8%	75.000.000	0,0%	0,0%	9.451.817.000	47,7%	47,7%
3	567428	BPSIP Sumatera Utara	4.946.215.000	54,5%	54,5%	5.117.772.000	35,9%	35,5%	110.000.000	0,0%	0,0%	10.173.987.000	44,6%	44,4%
4	567449	BPSIP Sumatera Barat	5.919.161.000	52,4%	51,8%	6.694.363.000	43,1%	43,1%	200.000.000	0,0%	0,0%	12.813.524.000	46,7%	46,4%
5	567460	BPSIP Riau	4.392.556.000	58,4%	58,4%	3.332.947.000	35,6%	35,6%	100.000.000	0,0%	0,0%	7.825.503.000	47,9%	47,9%
6	634001	BPSIP Jambi	4.141.215.000	54,8%	54,8%	4.458.538.000	50,1%	50,1%	100.000.000	100,0%	100,0%	8.699.753.000	52,9%	52,9%
7	567495	BPSIP Sumatera Selatan	3.651.066.000	58,9%	58,9%	4.654.712.000	25,5%	25,0%	3.099.672.000	7,9%	7,9%	11.405.450.000	31,4%	31,2%
8	633996	BPSIP Bengkulu	4.583.933.000	58,7%	58,0%	3.730.246.000	37,5%	36,7%	775.000.000	0,0%	0,0%	9.089.179.000	45,0%	44,3%
9	567517	BPSIP Lampung	4.097.846.000	60,0%	60,0%	8.539.880.000	25,1%	25,1%	804.611.000	0,0%	0,0%	13.442.337.000	34,2%	34,2%
10	450840	BPSIP Kepulauan Bangka Belitung	2.188.839.000	54,9%	54,3%	3.744.636.000	38,3%	38,3%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5.933.475.000	44,5%	44,2%
11	320091	BPSIP Kepulauan Riau	1.395.036.000	60,0%	59,3%	2.616.639.000	36,9%	34,3%	50.000.000	0,0%	0,0%	4.061.675.000	44,4%	42,4%
12	633961	BPSIP DKI Jakarta	2.519.514.000	56,4%	56,4%	2.812.209.000	38,3%	36,1%	100.000.000	0,0%	0,0%	5.431.723.000	46,0%	44,9%
13	567296	BPSIP Jawa Barat	6.032.147.000	63,3%	57,5%	9.834.540.000	27,4%	27,4%	915.000.000	0,0%	0,0%	16.781.687.000	38,8%	36,7%
14	450831	BPSIP Banten	3.281.962.000	59,6%	54,3%	4.121.741.000	39,1%	39,1%	815.000.000	0,0%	0,0%	8.218.703.000	43,4%	41,3%
15	567318	BPSIP Jawa Tengah	8.566.710.000	54,6%	49,8%	9.841.415.000	25,7%	25,6%	450.000.000	4,4%	4,4%	18.858.125.000	38,3%	36,1%
16	633975	BPSIP DI Yogyakarta	6.082.231.000	51,0%	50,9%	4.309.863.000	41,5%	41,5%	125.000.000	0,0%	0,0%	10.517.094.000	46,5%	46,5%
17	567364	BPSIP Jawa Timur	6.538.416.000	57,4%	57,4%	11.021.763.000	22,9%	22,8%	800.000.000	2,5%	2,5%	18.360.179.000	34,3%	34,3%

NO	KODE	SATUAN KERJA	Pegawai			Barang			Modal			Total		
			PAGU	Realisasi (%)		PAGU	Realisasi (%)		PAGU	Realisasi (%)		PAGU	Realisasi (%)	
				SPM	SP2D		SPM	SP2D		SPM	SP2D		SPM	SP2D
18	633982	BPSIP Bali	5.930.799.000	62,4%	62,4%	3.488.719.000	32,5%	32,5%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9.419.518.000	51,3%	51,3%
19	634040	BPSIP NTB	6.327.156.000	55,3%	55,3%	6.458.070.000	27,6%	24,8%	840.000.000	0,0%	0,0%	13.625.226.000	38,8%	37,4%
20	567783	BPSIP NTT	7.841.489.000	58,2%	53,1%	5.529.501.000	37,5%	37,5%	100.000.000	0,0%	0,0%	13.470.990.000	49,3%	46,3%
21	567627	BPSIP Kalimantan Timur	5.156.055.000	55,3%	55,2%	4.438.324.000	34,2%	34,2%	795.000.000	0,0%	0,0%	10.389.379.000	42,1%	42,0%
22	567570	BPSIP Kalimantan Tengah	2.747.951.000	52,8%	52,8%	4.893.653.000	39,5%	37,0%	615.000.000	0,0%	0,0%	8.256.604.000	41,0%	39,5%
23	567563	BPSIP Kalimantan Barat	4.557.179.000	52,0%	51,9%	6.574.883.000	30,9%	30,5%	200.000.000	0,0%	0,0%	11.332.062.000	38,8%	38,6%
24	634015	BPSIP Kalimantan Selatan	5.022.631.000	48,7%	48,7%	4.073.064.000	40,7%	40,7%	715.000.000	0,0%	0,0%	9.810.695.000	41,8%	41,8%
25	634022	BPSIP Sulawesi Utara	4.895.641.000	49,2%	49,2%	5.009.598.000	23,0%	23,0%	100.000.000	0,0%	0,0%	10.005.239.000	35,6%	35,6%
26	567673	BPSIP Sulawesi Tengah	3.912.449.000	56,9%	56,7%	4.169.282.000	33,2%	33,2%	2.478.826.000	0,2%	0,2%	10.560.557.000	34,2%	34,2%
27	634036	BPSIP Sulawesi Selatan	8.547.895.000	56,3%	51,4%	11.894.367.000	38,5%	36,9%	885.000.000	0,0%	0,0%	21.327.262.000	44,1%	41,2%
28	567702	BPSIP Sulawesi Tenggara	4.528.623.000	48,3%	47,9%	6.518.795.000	39,0%	38,9%	50.000.000	0,0%	0,0%	11.097.418.000	42,6%	42,4%
29	500957	BPSIP Sulawesi Barat	1.943.573.000	62,0%	56,5%	3.454.672.000	51,4%	51,4%	60.000.000	0,0%	0,0%	5.458.245.000	54,6%	52,6%
30	450856	BPSIP Gorontalo	2.945.000.000	58,6%	58,0%	3.203.795.000	43,9%	43,6%	80.000.000	0,0%	0,0%	6.228.795.000	50,3%	49,9%
31	567737	BPSIP Maluku	3.043.494.000	57,0%	57,0%	4.050.676.000	35,4%	35,4%	100.000.000	0,0%	0,0%	7.194.170.000	44,0%	44,0%
32	450862	BPSIP Maluku Utara	2.188.409.000	57,2%	57,2%	3.399.178.000	33,5%	33,5%	30.000.000	0,0%	0,0%	5.617.587.000	42,6%	42,6%
33	450871	BPSIP Papua Barat	1.742.239.000	62,9%	56,9%	3.350.733.000	40,9%	40,9%	4.532.073.000	0,9%	0,9%	9.625.045.000	26,0%	24,9%
34	567830	BPSIP Papua	4.051.199.000	60,7%	55,0%	3.703.965.000	38,7%	38,7%	2.855.904.000	0,0%	0,0%	10.611.068.000	36,7%	34,5%
		TOTAL	157.832.321.000	55,0%	53,6%	182.754.992.000	34,7%	34,2%	23.492.260.000	2,2%	2,2%	364.079.573.000	41,4%	40,5%

Tabel 7. Realisasi fisik RO-KRO

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	SATUAN	TARGET	REALISASI FISIK	PROGRES %	PAGU	REALISASI	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					46.259.611.000	7.642.783.395	16,52
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					46.259.611.000	7.642.783.395	16,52
6916.ADA	Standarisasi Produk					3.805.000.000	574.252.065	15,09
6916.ADA.101	Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan	Standar	1			75.000.000	0	0
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Standar	51	0,683	19,65	3.730.000.000	574.252.065	15,4
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi					11.694.350.000	3.117.725.519	26,66
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	orang	9765	308,25	21,38	11.694.350.000	3.117.725.519	26,66
6916.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga					5.005.650.000	644.593.801	12,88
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga	34	1,403	14,3	5.005.650.000	644.593.801	12,88
6916.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup					10.454.611.000	169.000.000	1,62
6916.CAG.107	Sarana Laboratorium Standardisasi Pascapanen Pertanian	Unit	1	0,1	4	300.000.000	0	0
6916.CAG.109	Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	30	1,15	20,39	10.154.611.000	169.000.000	1,66
6916.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga					15.300.000.000	3.137.212.010	20,5
6916.QDB.101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	Lembaga	9	0,233	29,71	15.300.000.000	3.137.212.010	20,5
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					32.900.000.000	2.659.819.055	8,08
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar					32.900.000.000	2.659.819.055	8,08
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup					32.900.000.000	2.659.819.055	8,08
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Unit	231.5	0,18	19,97	29.730.000.000	1.913.387.664	6,44
6915.CAG.102	Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	Unit	113000	0,1	195,83	1.460.000.000	373.921.376	25,61
6915.CAG.103	Produk Instrumen Tanaman Hortikultura Terstandar	Unit	10000	0	25,75	150.000.000	11.296.600	7,53
6915.CAG.104	Produk Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Terstandar	Unit	44379	0,1	17,4	1.560.000.000	361.213.415	23,15

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	SATUAN	TARGET	REALISASI FISIK	PROGRES %	PAGU	REALISASI	%
WA	Program Dukungan Manajemen					284.919.962.000	137.364.291.979	48,21
1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian					71.397.371.000	70.869.927.083	99,26
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					71.397.371.000	70.869.927.083	99,26
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	34	19,1867	87,01	71.397.371.000	70.869.927.083	99,26
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian					213.522.591.000	66.494.364.896	31,14
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					182.298.331.000	59.454.246.934	32,61
6918.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	31	9,3575	34,34	2.527.044.000	707.384.738	27,99
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	95	300.000.000	283.853.504	94,62
6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	10	150.000.000	9.685.500	6,46
6918.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	34	9,174	24,25	11.080.437.000	2.038.948.565	18,4
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	36	10,637	33,09	168.240.850.000	56.414.374.627	33,53
6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					13.037.649.000	341.645.735	2,62
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	7	0,2	11	13.037.649.000	341.645.735	2,62
6918.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					2.199.341.000	730.877.721	33,23
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Orang	1884	268,2	37,58	2.199.341.000	730.877.721	33,23
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					15.987.270.000	5.967.594.506	37,33
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	35	9,984	38,92	10.398.723.000	4.421.546.909	42,52
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	34	9,214	23,98	2.526.645.000	545.258.751	21,58
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	34	10,0005	34,63	3.061.902.000	1.000.788.846	32,69
TOTAL						364.079.573.000	147.666.894.429	40,56

4.1.4. E-SAKIP

Aplikasi e-SAKIP untuk pemantauan kinerja lingkup Kementan. Pada aplikasi e-SAKIP pengisian capaian target triwulan belum dapat dilakukan karena pada e-PK belum dapat dilakukan pengisian breakdown target, sehingga dalam aplikasi e-SAKIP masih terdapat ketidaksesuaian data unit kerja, khususnya pada menu peta indikator kinerja.

4.2. Kegiatan Manajemen

4.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Administrasi dan Manajemen SDM (Kepegawaian) merupakan kegiatan yang dilaksanakan berkelanjutan dari tahun sebelumnya. Waktu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keluaran yang diharapkan dilakukan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dalam pelaksanaannya Pengelolaan dan Pengembangan SDM melaksanakan beberapa proses dan tahapan yang meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengembangan pegawai; Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan pegawai dilaksanakan antara lain melalui : (1) Pelatihan jangka panjang/jangka pendek (2) Ujian Dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI) (3) Pemutakhiran Database – SIMASN berbasis WEB (4) Pemberian Penghargaan (5) Penyelesaian kasus etika dan disiplin pegawai dan (6) Izin belajar biaya sendiri.
- b. Mutasi Kepegawaian ; meliputi (1) Kenaikan Pangkat, (2) Mutasi Alih Tugas, (3) Pensiun, (4) Satuan Kerja Pegawai (SKP), (5) Pencantuman Gelar dan Penyesuaian Ijazah, (6) dan (7) Proses Cuti.
- c. Administrasi Jabatan Fungsional; terdiri dari (1) Proses penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK), (2) Proses usulan Pengangkatan Pejabat fungsional, (3) Proses Kenaikan jabatan fungsional (4) Proses Pembebasan Sementara, (5) Pemberhentian Jabatan Fungsional (6) Aktif fungsional dan (7) Aktif Bekerja Kembali.
- d. Pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja; terdiri dari (1) Rekon data Tukin, (2) Pengumpulan Absensi, (3) Nominatif Data Tukin dan (4) Surat Tanda Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) Tukin.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pemrosesan administrasi kepegawaian dan penanganannya antara lain :

Perencanaan dan Pengembangan Pegawai :

- a. Perolehan CPNS yang ditempatkan di BB Penerapan jauh dari rencana kebutuhan yang telah diajukan sehingga kekurangan pegawai di beberapa BPSIP belum dapat terpenuhi, naumun demikian CPNS yang sudah ditempatkan di lingkup BB Penerapan agar dioptimalkan sebaik mungkin;
- b. Dalam pengusulan training jangka panjang dan jangka pendek sering terdapat kekurangan berkas yang dipersyaratkan sehingga akan menimbulkan keterlambatan

proses. Untuk mengurangi keterlambatan tersebut pelaksana kepegawaian harus menghubungi UPT yang usulannya belum lengkap.

- c. Calon yang telah diusulkan untuk mengikuti training pada saat pelaksanaannya ada beberapa yang mengundurkan diri sehingga harus segera mencari penggantinya;
- d. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya antara lain tidak melaporkan kemajuan belajarnya setiap semester sehingga bagi pegawai yang belum melapor harus dihubungi satu persatu;
- e. Dalam proses pengusulan izin belajar biaya sendiri sering tidak dilengkapi dengan berkas persyaratan yang diperlukan dan sering pegawai yang mengusulkan izin belajar sudah sekolah sebelum izin belajar keluar. Hal ini akan merugikan pegawai itu sendiri terutama bila izin belajarnya tidak disetujui;
- f. Updating data SIMASN berbasis web tidak dilakukan setiap bulan sehingga data pegawai tidak berkembang. Pengelola SIMASN selalu diingatkan agar melakukan updating data.

Peningkatan kualitas mutasi pegawai;

a. Proses kenaikan pangkat :

- 1) Kenaikan golongan IV/c ke atas pada umumnya mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena proses kenaikan pangkat IV/c ke atas harus melalui rantai birokrasi yang lebih panjang. Untuk mengantisipasinya diusahakan berkas usulan harus lengkap dan diusulkan lebih awal dibandingkan usulan kenaikan pangkat di bawahnya;
- 2) Dalam penyerahan usulan, masih terdapat kekurangan berkas terutama SKP yang seharusnya 2 tahun terakhir akan tetapi ada beberapa yang menyampaikan berkas SKP hanya 1 tahun terakhir dan sehingga pengelola kepegawaian harus meminta kekurangannya, dan ada juga yang tertunda kenaikan pangkatnya karena ijazah tidak dilegalisir sesuai dengan ketentuan.
- 3) Dalam kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah masih terdapat Ijazah yang belum dilegalisir sehingga terpaksa usulan kenaikan pangkatnya tertunda pada periode berikutnya.

b. Pemrosesan mutasi pegawai.

- 1) Beberapa pegawai yang akan mutasi tidak faham dengan prosedur mutasi sehingga dapat memperlambat proses;
- 2) UPT yang menerima pegawai tidak dilengkapi dengan analisis jabatan dan analisa beban kerja serta peta jabatan sehingga harus disurati lagi;
- 3) Dalam pemberian izin mutasi, pimpinan UPT harus mempertimbangkan agar tidak mempengaruhi kelancaran kinerja UPT.
- 4) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masih terdapat kendala terutama dalam pengisian uraian kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas sehari-hari sehingga masih perlu ditinjau kembali nama jabatan yang diemban pegawai tersebut.

- c. Peningkatan kualitas jabatan fungsional :
- 1) Dalam pengusulan DUPAK pejabat fungsional sering kali waktunya sudah mendekati masa pembebasan sehingga Tim Penilai terpaksa menyegerakan proses penilaian;
 - 2) Masih ada kekurangan berkas dalam pengusulan sehingga menyebabkan proses menjadi lebih lama;
- d. Pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja;
- 1) Dalam pengusulan rekon data tukin tidak dilengkapi dengan data dukung, sehingga terkendala dalam pelaksanaan Rekon;
 - 2) Data dukung perubahan pemangku jabatan yang masih belum diupdate di SIMASN;
 - 3) Pengiriman absensi kehadiran sering terlambat;
 - 4) Pengisian dan penilaian SKP pegawai setiap bulannya yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan sehingga berpengaruh terhadap Tunda Bayar tukinya;
 - 5) Pengusulan nominatif tukin masih ada yang terlambat sehingga terpaksa memakai data nominatif bulan sebelumnya;
 - 6) Usulan nominatif tukin sering kali tidak diperiksa dulu data pegawai, terutama dalam hal pemotongan karena tugas belajar, pajak dan lain sebagainya.

Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: kurang responsif, kurang informatif, jauh dari jangkauan sehingga menyulitkan dalam melakukan pelayanan, kurang berkoordinasi dan birokrasi yang menyebabkan proses pelayanan terlalu lama serta kurang mendengarkan keluhan sehingga pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari pernyataan tersebut relevan dengan keadaan yang terjadi pada berbagai organisasi publik pada saat ini. Untuk mengawali peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pelayanan bagi para stakeholders, Balai Besar Penerapan harus mempunyai persepsi, komitmen dan pandangan yang sama dari berbagai tingkatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di kantor BB Penerapan. Utamanya harus kembali pada penguatan perencanaan, strategi dan kompetensi SDM yang harus menjadi prioritas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Kesuksesan organisasi tentu saja tidak terlepas dari peran manajemen dan pengelolaan Sumberdaya Manusia di lingkungan organisasi. Perencanaan, implementasi dan evaluasi organisasi akan tercapai optimal jika dilaksanakan berdasarkan rencana strategis, Visi dan Misi yang diimplementasikan secara sinergis. Untuk mendukung pelaksanaan program Balai

Besar Penerapan tersebut, diperlukan tenaga yang profesional dan handal sehingga dapat dihasilkan inovasi berstandar yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Pelayanan administrasi kepegawaian di BB Penerapan saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai koordinator 33 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang tersebar di seluruh propinsi, BB Penerapan harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas agar mampu melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian serta menghasilkan produk berstandar yang dapat bermanfaat bagi para stakeholders.

4.2.2. Pengelolaan Ketatausahaan Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan BB Penerapan

Pengelolaan Ketatausahaan Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan merupakan kegiatan pengelolaan perkantoran yang dapat menunjang kelancaran tugas perkantoran dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan operasionalisasi perkantoran. Dengan adanya pengelolaan rumah tangga, kearsipan dan perlengkapan maka diharapkan operasionalisasi perkantoran berjalan dengan baik, efisien dan tertib sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BB Penerapan.

Pelayanan Kesehatan BB Penerapan telah menyiapkan sarana obat-obatan dan bahan pendukung medis dan honorarium dokter yang dikelola bersama di kawasan kampus penelitian cimanggu yang diperuntukan bagi karyawan PNS/Honorer dan anggota keluarga.

Pada Triwulan 2 Tahun 2023 di BB Penerapan terdapat beberapa kegiatan pengadaan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 536.174.000- (Lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dilaksanakan baik melalui lelang, maupun pengadaan langsung, yang telah direalisasikan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan senilai Rp. 81,488,000,- (*delapa puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN, dengan adanya penataan BMN diharapkan dapat memaksimalkan mengevisiensi anggaran perawatan dan untuk peremajaan kembali BMN yang selama ini kondisinya sudah tidak sesuai dengan kondisi BMN yang ada. Ruang lingkup dalam penatausahaan BMN meliputi :

Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

4.2.3. Kegiatan Publikasi dan Humas

Aktivitas yang dilakukan dalam subkelompok PHP diantaranya Pelayanan publik, media diseminasi/media sosial, perpustakaan dan database. Pembinaan ruang PPID sesuai standard pelayanan Informasi Publik, pelaporan bulanan, updating database PPID secara berkala, pengisian dan pemanfaatan PPID UK/UPT terhadap aplikasi Portal PPID yaitu melalui Silayan *Online*, Database dokumen dan menu transparansi kinerja. Kegiatan rutin yang telah dilaksanakan bulan Juni adalah: (1) pembuatan Laporan kunjungan bulan Juni 2023, paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya; (3) penyebaran Form IKM di bagian

pelayanan; perpustakaan dan Taman Agro edu wisata; dan (4) mengupload database menu Transparansi dan database instansi.

Melayani permohonan informasi/layanan yang masuk ke BBPSIP, serta menjembatani/menindaklanjuti baik melalui surat atau datang langsung, yaitu (1) Permohonan tindak lanjut kegiatan magang sekaligus survey lokasi magang Taman Agrionovasi tanggal 5 Juni; (2) Permohonan tindak lanjut kegiatan magang 9 Mei 2023 Sekolah Vokasi IPB Jurusan Teknologi Rekayasa Komputer tanggal 5 Juni untuk memenuhi tugas kampus dan kurikulum pendidikan; (3) Permohonan informasi terkait administrasi kepegawaian, RTP dan asset tanggal 9 Juni; (4) Mengantar Perjanjian Kinerja ke bagian Program BBPSIP tanggal 9 Juni; (5) Permohonan bertemu dengan PPK untuk penarawaran barang dan jasa dari Fibernet tanggal 13 Juni; (6) Permohonan Kunjungan Tagrinov Universitas Lampung tanggal 20 Juni; dan (7) Permohonan Pengurusan berkas kepegawaian tanggal 21 Juni.

Perencanaan, penguatan, dan evaluasi tim untuk media diseminasi online, meliputi kecepatan hunting artikel, pembuatan konten, penyelesaian desain, kecepatan posting baik berupa tulisan, audio, dan video.

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk semester 1 dan memperoleh nilai 89,15 dengan kriteria sangat baik. Nilai SKM ini harus dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Balai Besar Penerapan.

Kinerja Medsos pada bulan Juni yaitu : (1) Instagram: jangkauan konten postingan 2.747, reels 2.299, cerita 193, video 6, pengikut 1.081, bukan engikut 2.839, total postingan 58, akun yang dijangkau 3.920 (meningkat 44,5%), akun yang berinteraksi 273 (menurun 2,5%), total Pengikut 2.242 (meningkat 1,2%); (2) Facebook: jumlah postingan 59, jangkauan postingan 4.200, interaksi postingan 1.300, pengikut halaman baru 9, tanggapan 758, komentar 16, berbagi 79, tayangan foto 916, klik tautan 5, pengunjung laki-laki 65.80%, pengunjung perempuan 34.20%, lokasi pengunjung mayoritas berada di Bogor (246), DKI Jakarta (241), dan Makassar (134); (3) Twitter: tweet 22, penayangan tweet 1.171, kunjungan profil 116, sebutan 4, dan pengikut baru berjumlah 8.

Pengelolaan perpustakaan yang dilakukan berupa proses sirkulasi peminjaman buku sebanyak 2 judul, proses sirkulasi bahan pustaka sebanyak 11 judul, melakukan pengklasifikasian koleksi bahan pustaka sebanyak 2 judul, melengkapi kekurangan akreditasi sebanyak 1 laporan, Melakukan penginputan koleksi sebanyak 58 judul, Menginput koleksi baru yang merupakan koleksi hadiah sebanyak 2 judul, Melengkapi borang akreditasi sebanyak 1 laporan, menyusun koleksi perpustakaan sebanyak 44 judul, Melakukan proses selfing bahan pustaka sebanyak 50 judul, Melakukan koordinasi dengan sinar tani untuk berlangganan sebanyak 20 judul.

Untuk kegiatan database, kegiatan rutin yang dilakukan adalah merekap pegawai yang menggunakan jaringan internet serta menerima umpan baliknya, perbaikan jaringan wifi, dan melakukan koordinasi database Jaringan Petani Nasional lingkup BSIP dan maintenance database website BB Penerapan.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa permasalahan selama bulan April-Juni dalam menjalankan kegiatan. Permasalahan tersebut antara lain belum tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk podcast; keterlambatan penyediaan kelengkapan informasi seperti banner, spanduk, leaflet, dan lain-lain; ketidakterediaan anggaran untuk mengadakan barang di perpustakaan; kekurangan SDM pengelola perpustakaan; pengadaan fasilitas layanan di BB Penerapan untuk *disable* (toilet, jalan khusus, alat bantu); penandatanganan komitmen bersama menunggu pengukuhan/ penetapan Subkoordinator dan Koordinator BB Penerapan; penyediaan interior papan nama PPID, serta Kendala teknis pada data file backup lama website BBP2TP

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya pemecahan masalah, yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang menyiapkan fasilitas dan infrastruktur tersebut, yaitu subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, dibawah Tata Usaha; mempercepat proses desain dan percetakan spanduk, banner, leaflet, dan kelengkapan lainnya; mengalokasikan SDM untuk membantu pengelolaan perpustakaan; berkoordinasi dengan BSIP terkait alokasi anggaran pengadaan fasilitas disable.

Kesimpulan

Kegiatan subkelompok PHP merupakan kegiatan yang dilakukan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi terkait standar instrumen pertanian sesuai tugas dan fungsi BPPSIP, serta database system informasi. Kebutuhan tersebut disampaikan melalui kegiatan *offline* (tatap muka) dan secara *online* (media massa terlanggan, website, dan media sosial), media massa tercetak, serta layanan perpustakaan BBPSIP. Selama bulan Juni ini, realisasi kegiatan fisik telah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan setiap bulannya. Realisasi keuangan belum sesuai target karena anggaran belum bisa digunakan akibat adanya perubahan organisasi. Permasalahan yang ditemui dalam menjalankan kegiatan hingga saat ini dapat diselesaikan dengan upaya pemecahan masalah yang dilakukan tim.

4.2.4. Kerjasama

Peningkatan layanan Kerjasama pada bulan Juni yaitu dengan melakukan data benih padi, jagung dan kedelai lingkup Balai Besar Penerapan. Data benih ini dibutuhkan terkait arahan Menteri Pertanian untuk mendistribusikan benih adaptif kekeringan untuk mengantisipasi El-Nino. Varietas padi adaptif kekeringan yang tersedia di lingkup BB diantara inpage fortiz 13, cakrabuana dan inpari 42. UPBS yang ditunjuk untuk menyediakan benih tersebut yaitu BPSIP Bengkulu dan BPSIP Riau.

Dalam hal layanan Kerjasama luar negeri lingkup BB Penerapan, tim RCM/LKP (Layanan Konsultasi Padi) BBPSIP melakukan inisiatif untuk membuat *handbook* atau *Guidelines* untuk *Working Package 4* bekerjasama dengan IRRI *Headquarter* dan PSITP. *Handbook* ini diharapkan akan menjadi acuan bagi BPSIP dalam pelaksanaan FGD, KII dan *Online Survey* yang menjadi bagian dari WP4. Pelaksanaan online survey telah selesai pada akhir Juni 2023. Kegiatan RCM ini dilaksanakan di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.

Untuk kegiatan AFACI, telah dilakukan Baseline kegiatan AFACI Ke Desa Jomin Timur dan Desa Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang. Baseline kegiatan ini selanjutnya akan dianalisis untuk ditindaklanjuti finalisasi penetapan lokasi kegiatan .

Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara BBPSIP dengan Direktorat Penguatan Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentang Fasilitasi Bimbingan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian di BPSIP Papua Barat. Implementasi PKS ini telah dilakukan bimbingan teknis secara online di BPSIP Papua Barat tahap 1. Ada 4 tahap dalam kegiatan bimtek ini yang akan ditindaklanjuti sampai akhir tahun.

BBSIP juga mengkoordinasikan Kerjasama antara BPSIP Riau dengan Pemda Riau terkait pengelolaan produk hasil standardisasi instrument pertanian dan penerapan standar. Untuk memayungi PKS ini perlu dibuat kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Riau dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sebanyak 2 kali pertemuan telah dilakukan dengan melibatkan BBPSIP yaitu diskusi terkait Nota Kesepahaman dan diskusi terkait PKS. Draft PKS akan difinalisasi dan selanjutnya memastikan tanggal penandatanganan MoU kedua pimpinan. Selain itu terdapat pelaksanaan koordinasi Fasilitasi kegiatan program transformasi KP Sitiung menjadi Pusat Material Genetik Kelapa Sawit milik Indonesia

Untuk layanan magang mahasiswa, BBPSIP menerima lima mahasiswa Praktek Kerja Lapang yang akan dilaksanakan selama 3 bulan (Juni-September). Kelima mahasiswa tersebut berasal dari jurusan Agroteknologi dan Pengembangan Masyarakat, Vokasi IPB. Mereka mengambil tema budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik serta budidaya bunga telang dengan media tanam beda perlakuan.

Untuk menjaring kolaborasi lebih lanjut dengan BSN, maka dilakukan Koordinasi kegiatan pendampingan sarana pengujian lembaga sertifikasi ke Badan Standardisasi Nasional yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan diskusi terkait penerapan standar.

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan TA 2023 Lingkup BBPSIP sampai dengan bulan Juni 2023 berjalan dengan baik. Namun demikian, perlu dilakukan langkah percepatan agar capaian realisasi kegiatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Capain realisasi anggaran sampai dengan Juni 2023, sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai) dengan capaian pada bulan Juni sebesar 54,60%.
- Kegiatan Perbenihan total anggaran sebesar Rp. 6,6 milyar, realisasi fisik proses hingga bulan Juni 2023 mencapai 25,6%, sedangkan realisasi output baru mencapai 0,3%.
- Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik anggaran sebesar Rp. 3,8 M, hingga 30 Juni 2023, realisasi anggaran yang telah digunakan mencapai Rp. 422,875 juta (11,11%).
- Bimtek aspirasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 25 Milyar dengan realisasi sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp. 319,605 juta (1,28%).
- Anggaran Bimtek Non DAPIL sebesar Rp 1,3 Milyar, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 236,04 juta (18,16%).
- Anggaran kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian lingkup BBPSIP sebesar Rp. 5 Milyar. Hingga saat ini, realisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 585,850 juta (11,70%).
- Anggaran kegiatan pendampingan sarana pengujian lembaga sertifikasi adalah sebesar Rp. 10,4 Milyar Hingga saat ini (30 Juni 2023), realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 169 juta (1,62%).

5.2 Penutup

Melalui penyusunan laporan kinerja secara periodik, diharapkan informasi yang komprehensif tentang pencapaian tujuan dan target program BBPSIP TA 2023 dapat diperoleh. Laporan ini juga diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis terkait program BBPSIP tahun 2023.